

**PENGATURAN PIDANA PENDANAAN TERORISME SEBELUM
DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Ni Luh Putu Annisa Virta Artana

NIM: 312013025



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
JANUARI 2017**



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Annisa Virta Artana
NIM : 312013025 Email : Niluhputu20@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Pengaturan Pidana Pendanaan Terorisme Sebelum dan Setelah Bertakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Pembimbing : 1. Arie Siswanto, SH., M.Hum.
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 31 Januari 2017


Putu Annisa V. A
dan di nama terang mahasiswa



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Luh Putu Annisa Virta Artana
NIM : 312013025 Email : Niluhputu20@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Pengaturan Pidana Pendanaan Terorisme Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan alasan tertulis dari pembimbing T.A dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 31 Januari 2017

Ni Luh Putu Annisa V.A
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Arie Siswanto, S.H., M.Hum.
Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**PENGATURAN PIDANA PENDANAAN TERORISME SEBELUM
DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Ni Luh Putu Annisa Virta Artana

NIM: 312013025

Pembimbing



Arie Siswanto, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

JANUARI 2017

Lembar Pengujian

Komisi Penguji

Penguji I



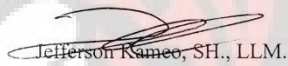
Dr. Titon S. Kurnia, S.H.,
MH.

Penguji II



Arie Siswanto, SH., M.Hum.

Penguji III

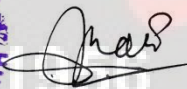


Jefferson Kameo, SH., LL.M.

Diuji pada tanggal 27 Januari 2017

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas perlimpahan rahmat, karunia-Nya serta pertolongan-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat dilancarkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk penyelesaian skripsi ini, penulis melewati begitu banyak proses yang panjang dan tidak mudah untuk dilewati. Berkat motivasi, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak yang tak pernah putus pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga Besar Bambang Hardjono, Mamaku tersayang, Bunda Rini, Bunda Shisy, Om Zamri, Adek Lia, Adek Salsa, Adek Zhie, Putri, Hanny, Mas Adzan, Bagus, Mama Bagus, Mama Titik terimakasih atas segala doa yang begitu besarnya, kasih sayang, motivasi dan semangat yang tidak pernah berhenti kepada penulis.
2. Bp. Arie Siswanto, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu untuk membimbing, memberi pengarahan, dan memotivasi kepada penulis sejak awal penulisan skripsi sampai pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Jefferson Kameo, SH., LLM. dan Dr. Titon S. Kurnia, S.H., MH. bapak selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan dan arahan dalam skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UKSW dan Ibu Dr. Christina Maya Indah S., SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, beserta seluruh keluarga besar civitas akademika Fakultas Hukum UKSW Salatiga, semua dosen yang telah memberikan ilmu kepada Penulis, dan staff Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan selama berkuliah di Fakultas Hukum UKSW Salatiga.
5. Sahabat-sahabat terbaikku, Adinda Tiara, Hapni Putri, Yolanda, Amelia Dian, Diah Marla, Alm. Faza Aryandana, Kristiani, Stefanus Bintang, Aldyka San, Michael Andreo, Heri Fadeo, Renaldy, Chikita Edrini Marpaung, Agnetia Dian, Raisa Sanger, Dhimar, Anita Aulia, Danu Tirta, Vanesha Putri, Farah Syifa, Indah, Sena dan teman-teman terkasih yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan doa yang luar biasa besarnya kepada penulis.
6. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, khususnya teman-teman angkatan 2013 yang telah banyak membagi suka duka selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum UKSW Salatiga.

Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian dimasa depan khususnya bagi perkembangan kemajuan Ilmu Hukum. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salatiga, 27 Januari 2017

Penulis

Ni Luh Putu Annisa Virta Artana

KATA PENGANTAR

Karya ilmiah ini merupakan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana khusus, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengkaji Putusan No.113/PID/2013/PT.DKI. dan Putusan No. 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang disorot dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan mengkaji terhadap Putusan No.113/PID/2013/PT.DKI. dan Putusan No. 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM.

Peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dengan bahan peraturan perundang-undangan di atas penulis akan mengupas mengenai rumusan masalah yang selanjutnya menjadi temuan penulis dalam skripsi ini yang rumusannya yaitu bagaimana pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan melakukan kajian terhadap Putusan No.113/PID/2013/PT.DKI. dan Putusan No. 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM.

sehingga dapat mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam hukum pidana, terorisme memiliki banyak aspek dan perbedaan dalam banyak hal dari bentuk kriminalitas biasa. Indonesia sendiri telah menyadari akan bahaya terorisme. Sejalan dengan kian meningkatnya modus, senjata teroris dan target yang dituju, pada tataran internasional telah lahir satu komitmen internasional untuk melakukan perang global melawan terorisme. Karena itulah, maka pemerintah berupaya membuat Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Upaya untuk memerangi terorisme, perlu memotong jaringan keuangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan terorisme. Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memerangi terorisme bukan hanya dengan mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga mengkriminalisasi kegiatan pendanaan/pembiayaan terorisme kepada para teroris. Oleh karena itu, perang terhadap pendanaan terorisme merupakan langkah yang penting dalam memerangi terorisme itu sendiri. Karena, apapun rencana jahat para teroris itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dana.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih fokus penelitian pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dalam prespektif hukum pidana hal ini dilakukan dengan menggali konsep hukum dalam menganalisis pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Salatiga, 27 Januari 2017

Ni Luh Putu Annisa Virta Artana

ABSTRAK

PENGATURAN PIDANA PENDANAAN TERORISME SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Oleh
Ni Luh Putu Annisa Virta Artana

Pendanaan terorisme merupakan suatu tindakan penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang memfasilitasi, merencanakan atau melakukan terorisme. Upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memerangi terorisme bukan hanya dengan mengkriminalisasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga mengkriminalisasi kegiatan pendanaan/pembiayaan terorisme kepada para teroris. Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi salah satu peraturan yang mengkriminalisasi pendanaan terorisme. Beberapa pasal dalam undang – undang ini mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Selain peraturan ini, beberapa peraturan lain juga mengatur mengenai pendanaan terorisme. Rumusan masalah yang digunakan dari penelitian ini adalah pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan mengkaji terhadap Putusan No.113/PID/2013/PT.DKI. dan Putusan No. 629/PID/Sus/2014/PN.JKT.TIM. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematis norma dan aturan hukum tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Jika ditinjau dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013, perbuatan yang termasuk tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 yaitu dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, serta melakukan percobaan, permufakatan jahat, pembantuan, merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pendanaan terorisme.

Kata Kunci : Pendanaan Terorisme, Korporasi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGUJIAN	ii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12

E.	Metode Penelitian	13
F.	Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN		19
A.	Tinjauan Pustaka	19
1.	Tinjauan Mengenai Pengertian Terorisme	19
2.	Tinjauan Mengenai Pengertian Pendanaan Terorisme	30
3.	Motif dan Bentuk Pendanaan Terorisme	33
4.	Pengaturan Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	35
B.	Pembahasan	40
1.	Analisis Undang – Undang	40
2.	Analisis Putusan Perkara.....	44
BAB III PENUTUP.....		53
	Kesimpulan	53
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		60